

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Skala Nasional, pembangunan sektor pariwisata telah dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, wisata ialah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹ Kebijakan pembangunan sektor pariwisata mulai dimasukkan dalam undang-undang, keputusan presiden dan peraturan daerah. Sektor pariwisata masih dijadikan sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat diandalkan untuk pengembangan ekonomi. Untuk itu, maka pengembangan pariwisata dilakukan melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, sosial-budaya, hemat energi, pelestarian alam dan lingkungan. Setiap merumuskan kebijakan, Pemerintah harus memperhatikan berbagai hal diantaranya kehidupan masyarakat setempat. Dengan melihat kehidupan masyarakat setempat, utamanya masyarakat yang masih kental dengan hukum adat sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berbicara peluang di sektor pariwisata Majalengka memiliki potensi aset paling besar, dengan nuansa keindahan alam, gunung, bukit, hutan, sawah, dan sungai menjadi pemandangan yang cukup memikat hati untuk dikunjungi oleh wisatawan. Akan tetapi wisata di daerah Kabupaten Majalengka masih menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dari berbagai macam aspek yang ada, terutama dalam hal kebijakan yang sering tumpang tindih, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan

dan minimnya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. Unsur pokok yang harus mendapatkan perhatian guna menunjang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terhadap pariwisata di daerah ialah adanya sumber daya alam yang dapat menimbulkan rasa senang, nyaman, indah dan bersih, adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya, adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan, obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, bukit, hutan, sungai, sawah, dan lain-lain), pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sudah mengoptimalkan fungsinya dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun masih ada faktor yang menjadi penghambat pengembangan sektor pariwisata yaitu kebijakan yang masih sering tumpang tindih, kurang jelasnya aturan dan regulasi yang ada, kurangnya promosi yang dilakukan, sarana dan prasarana yang kurang memadai penunjang kepariwisataan, kurang meratanya pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap para wisatawan, pembangunan yang kurang merata dan minimnya pendanaan.

Secara Geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya luas dengan kekayaan alam dan kultur yang unik, berupa aset-aset pariwisata yang tersebar pada seluruh titik pulau Nusantara. Keberadaan seluruh aset merupakan potensi pariwisata yang dapat mendatangkan devisa bagi Negara, terutama masyarakat setempat. Melihat fungsinya yang konstruktif bagi bangsa dan masyarakat setempat, maka pariwisata perlu memiliki konsep dan definisi yang jelas.

Pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu: (1) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*). (2) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*). (3) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan

kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*). (4) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).² Lima prinsip dasar pembangunan di atas harus berorientasi pada pembangunan yang berwawasan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat), yang berarti adanya proses pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya.³

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah. Seperti yang telah di sebutkan di dalam Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam memutarakan roda perekonomian masyarakat telah menemui sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

- 1) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
- 2) Peningkatan lama tinggal wisatawan.
- 3) Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto daerah.⁴

Perjalanan wisata dapat terjadi dengan tersedianya sumber daya yang dapat menarik wisatawan. Sumberdaya pariwisata terdiri atas: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan sumber daya minat khusus.⁵ Sumber daya alam yang dapat menjadi sumber daya pariwisata menurut Fannel

² Agus Sunaryo, *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan* Malang: UB Press, 2010), 2

³ Agus Sunaryo, *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan* (Malang: UB Press, 2010),

3

⁴ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025

⁵ Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 69-75

seperti: lokasi geografis, iklim dan cuaca, topografi dan landforms, surface materials, air, vegetasi, fauna. Sumber daya manusia dalam pariwisata merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam pembangunan pariwisata. Faktor sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata. Sumber daya budaya dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisatanya.

Salah satu jenis pariwisata yang menggunakan sumber daya budaya sebagai modal utama dalam atraksi wisata disebut pariwisata budaya. Pariwisata budaya memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melakukan kontak langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang sesuatu objek budaya. Jenis pariwisata ini memberikan variasi yang sangat luas menyangkut dengan budaya, mulai dari seni pertunjukkan, seni rupa, festival, makanan tradisional, sejarah, pengalaman nostalgia dan cara hidup yang lain.

Pariwisata saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia modern karena kemajuan dari teknologi, serta informasi yang terus mengalami perkembangan.⁶ Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka berupaya terus menerus berbenah memanfaatkan peluang di dalam sektor pariwisata untuk perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Majalengka melalui sektor pariwisata yang ada di Majalengka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, identifikasi masalahnya antara lain sebagai berikut:

1. Masih sangat sedikit jumlah obyek wisata yang dikelola, dengan potensi alam yang sangat besar dan banyak.
2. Masih terbatasnya akses menuju lokasi obyek wisata.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung objek wisata.

⁶ Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 76

4. Sektor pariwisata yang belum bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis dapat menentukan beberapa rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pariwisata di Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap sektor pariwisata?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis dalam melakukan penelitian ini memfokuskan pada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka terhadap sektor pariwisata yang ada di Majalengka.
2. Sebagaimana yang kita ketahui pemerintah daerah kabupaten Majalengka Memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan pariwisata di Kabupaten Majalengka.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Terhadap Sektor Pariwisata.

2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pariwisata di Kabupaten Majalengka.
3. Untuk memahami kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka dengan adanya penulisan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Terhadap Sektor Pariwisata Perspektif Hukum Islam, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan dan pengetahuan baru di dalam bidang keilmuan hukum, khususnya berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Terhadap Sektor Pariwisata di Majalengka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap sektor pariwisata yang ada di Majalengka.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten Majalengka dalam mengelola wisata yang ada di Majalengka. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat dalam menjaga, memelihara cikal bakal potensi wisata yang ada di Majalengka, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

G. Kerangka pemikiran

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1, menjelaskan bahwa yang di maksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Urusan mengenai pengelolaan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah.⁷

Kebijakan adalah upaya memecahkan problem atau masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni: (1) Tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) Terjadi keadilan, (3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi) dan (4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁸ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000, 15

⁹ Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025 Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Mewujudkan Kabupaten Majalengka sebagai destinasi ekowisata alam argo dan seni budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta berbasis masyarakat yang agamis Tahun 2025”.¹⁰

2. Teori Pariwisata

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, suku, serta agama. Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal (1) Ayat (1) menjelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹¹ Dan di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal (1) Ayat (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹²

Pariwisata dapat di manfaatkan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara terbesar kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang

¹⁰ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.¹³

Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di Kabupaten Majalengka, dan dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat, pada gilirannya akan memberikan dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Majalengka dalam pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah untuk membiayai APBD terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana perimbangan
- c) Pinjaman daerah
- d) Lain-lain penerimaan daerah yang sah.¹⁴

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

¹³ Pendit, Nyoman S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999) 64

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Sektor pendapatan daerah di Kabupaten Majalengka memegang kebijakan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a) Pajak daerah

Menurut Siagian, dalam bukunya yang berjudul Pajak Daerah Sebagai Keuangan Daerah, pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.¹⁶

b) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

¹⁷ Undang-Undang N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Perspektif Hukum Islam

a) Pemerintahan

Untuk membahas soal-soal hukum tata negara islam sudah seharusnya meletakkan dasar dahulu ajaran-ajaran islam yang mengatur masalah-masalah kenegaraan atau pemerintahan. Di antara para orientalis ada beberapa bagian sarjana yang meyakini bahwa ajaran Islam tidak semata-mata hanya agama saja, akan tetapi juga mengatur masalah-masalah kenegaraan dan pemerintahan. Di kalangan jumbuh ulama juga berpendapat bahwasanya islam mengharuskan adanya negara dan pemerintahan, di samping itu juga meski jumlah nya kecil ada pula yang hanya membolehkan saja. Dan ada pula putra-putra islam pada zaman mutakhirin ini yang berpendapat bahwasanya tidak perlu ada campur tangan agama dalam kehidupan bernegara.

Orientalis yang mengakui kenyataan sebagaimana tersebut di atas antara lain C. A. Nollino yang berkata, "Muhammad telah meletakkan dasar agama dan negara pada waktu yang sama". Dan H. R. Gibb, menyatakan "Pada waktu itu menjadi sangat jelas bahwasannya islam bukanlah semata akidah agama yang individual sifatnya, akan tetapi islam mengharuskan dan mewajibkan mendirikan masyarakat yang mempunyai uslub-uslub tertentu di dalam pemerintahan dan mempunyai undang-undang serta aturan-aturan yang khusus.

Di kalangan ulama-ulama besar islam yang berbicara tentang hubungan antara agama dan negara ini antara lain di ungkapkan oleh Syekh Mahmud Syaltout sebagai berikut:

من المستحيل وصف دين الإسلام دون توجيهه من المجتمع وسياسة الدولة والحكومة ، لأنه إذا كان الأمر كذلك ، فالدولة ليست إسلامية

Artinya: *“Tidak mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya pengarahannya dari masyarakat dan politik negara, pemerintahan, karena apabila demikian negara itu tidak bersifat islami”*.¹⁸

Sebagaimana telah di kemukakan (Imamah-Khilafah) pemerintah ialah kepemimpinan umum bagi umat Islam dalam urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi SAW. Kebutuhan pembentukan imamah menurut al-Baghdadi, secara umum telah menjadi teori sunni. Juhur ulama mutakallimin dan fuqoha sepakat bahwa adanya imamah itu sangatlah wajib. Mengangkat seorang imam dan taat kepadanya adalah wajib dan penting. Karena ia berperan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum mengatur militer dan pajak serta lembaga perkawinan. Menurut Al-Baghdadi dasar otoritas pembentukan imamah di perselisihkan oleh umat Islam. Ada yang mengharuskan dan ada pula yang membolehkan (tidak wajib). Golongan yang mengharuskan atau yang mewajibkan ada dua golongan atau pendapat, ada wajib karena wahyu, serta ijma dan wajib pertimbangan dengan akal. Ini di perkuat dengan keputusan para sahabat Nabi yang sepakat membentuk pemerintahan setelah wafatnya Nabi.

Sebagaimana di sebutkan pembentukan pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian yaitu mengatur kehidupan dan umat baik urusan keagamaan maupun urusan ke duniaan dan untuk memelihara agama. Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, pemerintahan ialah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan

¹⁸ Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 81

kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, menjamin ketertiban urusan agama dan dunia.¹⁹

b) Pariwisata

Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut Rihlah artinya aktivitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu. Pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun atas dua suku kata: “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali berputar-putar. Wisata berarti perjalanan, bepergian. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 menyebutkan antara lain dalam pasal 1 Ayat (1) wisata adalah kegiatan perjalanan sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata lebih jauh.²⁰

Di dalam ayat (3) pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk penguasaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.²¹ Wisata bisnis, perjalanan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab di masa lampau karena menyadari bahwa kondisi geografis negeri mereka yang tandus, gersang dan panas. Mereka lebih memilih profesi dagang dari pertanian yang bergantung pada alam meskipun ada sebagian kecil yang berkebun kurma. Demikian juga bangsa penjajah seperti Portugis, Inggris dan Belanda yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Para pedagang biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari barang yang diproduksi suatu tempat untuk dijual ke tempat lain.

Wisata ilmiah, perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, penelitian, studi banding guna memperoleh ilmu atau ingin meneliti objek tertentu seperti sumber daya yang dimiliki dalam rangka menyempurnakan aspek-aspek kekurangan dan kelemahannya. Sebagai contoh sabda nabi tuntutlah ilmu sampai

¹⁹ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 229

²⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

²¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

ke negeri cina. Di hadist lain disabdakan oleh Rasulullah SAW: “Barangsiapa berpindah untuk mempelajari suatu ilmu, maka ia diberi ampunan sebelum melangkah (HR Tirmizi).

Perjalanan dakwah menunjukkan bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menyebar ke berbagai wilayah baru. Mereka rela meninggalkan kampung halaman (Madinah) yang subur, maju dan ber peradaban tinggi menuju daerah lain yang masyarakatnya terbelakang atau belum mengenal Islam. Kepergian mereka semata-mata untuk kepentingan penyebaran agama dan bukan mencari nafkah atau ingin menguasai daerah lain. Perjalanan diplomasi adalah perjalanan seseorang yang ditugaskan oleh penguasa dalam urusan ketatanegaraan, misalnya ambassador. Aktivitas tersebut dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang “mampu” ketika beberapa orang sahabat mendapat tugas dari Rasulullah untuk menyampaikan surat kepada para raja dan penguasa di sekitar jazirah Arab.

Di dalam al-Quran diperoleh banyak isyarat untuk melakukan aktivitas pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan income bagi negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang dapat menghasilkan income yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan.

Di dalam surat al-Ankabut ayat 19-20

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ١٩

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

Artinya: “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²²

Dalam ayat ini menegaskan bahwa manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai hakim yang Maha Adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Dan peradaban yang pernah dihasilkannya akan menjadi tonggak sejarah bagi generasi yang datang sesudahnya.

Demikian pula di dalam surah Yusuf ayat 109

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْلَمُونَ ١٠٩

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul) dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?”²³

Secara tegas menganjurkan agar menelusuri berbagai negeri. Ini merupakan isyarat bahwa manusia perlu mengenal budaya masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kebudayaan suatu masyarakat tidak dapat dipahami secara holistik tanpa terlibat langsung di dalamnya. Ayat ini juga menegaskan betapa banyak umat terdahulu telah dibinasakan Allah karena kedurhakaan

²² Al-Qur’an, 29:19-20.

²³ Al-Qur’an, 12:109.

mereka kepada ayat-ayatnya. Karena itu manusia harus menggunakan daya pikirnya untuk menemukan kebenaran, dan sekaligus meyakini kebenaran berita yang disampaikan al-Quran.

Surat al-Rum ayat 41-42 menyatakan bahwa

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١
 فَلَّ سَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”²⁴*

Kehancuran yang terjadi di permukaan bumi adalah karena kecerobohan dan tindakan manusia sendiri. Kandungan ayat-ayat ini menjelaskan bahwa manusia dapat menyaksikan langsung kehancuran dibelahan berbagai dunia sebagai akibat dari perilaku negatif manusia. Terjadinya bencana alam seperti banjir, polusi udara, air dan tanah serta erosi adalah akibat perbuatan manusia yang tidak beriman. Industri pariwisata sangat erat kaitannya dengan produk dari jasa, seperti transportasi, akomodasi, perhotelan, jasa boga bahkan keahlian berbahasa asing yang dapat memberdayakan sumber daya insani maupun sumber daya alam, seperti keindahan panorama alam, juga benda-benda bersejarah yang merupakan bagian dari objek wisata. Untuk maksud ini aktivitas pariwisata harus mempunyai tujuan yang jelas dan efektif sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat walaupun dalam proses pelaksanaannya mengalami berbagai pengalaman, yang menguntungkan ataupun merugi.

²⁴ Al-Qur'an, 30:41-42

Namun demikian pernyataan Al-Quran yang menjelaskan tentang pariwisata berakhir pada keinginan Allah swt untuk memberikan kesadaran kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-Nya Allah swt.

Untuk mempermudah dalam memahami kerangka pemikiran, maka penulis menyediakan ringkasan dalam bentuk model kerangka pemikiran sebagai berikut:



GAMBAR 1. 1: Kerangka Pemikiran

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata telah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menyajikan beberapa penelitian agar bisa digunakan untuk membandingkan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Jhonni Sun dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2020 dengan “**Kebijakan**

Pemerintahan Daerah Terhadap Kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) JO. Pasal 23 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Kota Singkawang”

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh sebagai upaya pariwisata berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Kota Singkawang. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Kebijakan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan festival tahunan Cap Go Meh dalam membangun dan mengembangkan pariwisata dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melakukan analisis terhadap jenis potensi obyek dan daya tarik wisata yang dapat mendukung penyelenggaraan perayaan festival Cap Go Meh di Kota Singkawang. Persamaan dan perbedaan antara jurnal Jhonni Sun dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas kebijakan, meneliti, memahami, dan mengkaji tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pariwisata. Sedangkan perbedaan dari skripsi Jhonni Sun dengan penulis skripsi Jhonni Sun lebih meneliti Pasal 14 Ayat (1) JO. Pasal 23 UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di kota Singkawang, dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkaji, memahami, hukum Islam terhadap pariwisata.²⁵

Kedua, Dimas Pratama Putra, dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “**Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata Bukit 29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang**”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam skripsinya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif ini, penulis menjelaskan bahwa Pengelolaan

²⁵ Jhonni Sun studi di Fakultas Hukum Universitas TanjungPura dengan judul “*Kebijakan Pemerintahan Daerah Terhadap Kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) JO. Pasal 23 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Kota Singkawang*”.

dan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lumajang dikembangkan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 tahun 2014 tentang desa wisata. Hal ini telah dibuktikan dengan masuknya sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan melalui program “Satu kecamatan Satu Desa Wisata” dan menetapkan 21 kelompok sadar wisata (POKDARWIS) di setiap kecamatan. Kelompok sadar wisata ini dibina melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik secara formal dan informal untuk mengembangkan, menjaga dan melestarikan objek wisata di sekitar tempat tinggal mereka. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Dimas Pratama Putra dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas kebijakan, meneliti, memahami, dan mengkaji tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pariwisata. Sedangkan perbedaan dari skripsi Dimas Pratama Putra dengan penulis ialah skripsi Dimas Pratama Putra lebih mengkrucut tata kelola pariwisata di Bukit 29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro kabupaten Lumajang, dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkaji, memahami, hukum Islam terhadap pariwisata.²⁶

Ketiga, di dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata”**. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang ditulis oleh Januar Dwi Baskoro pada tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif. Dalam Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata mengangkat permasalahan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dan mengetahui kendala kendala dalam Implementasi Kebijakan. Jenis penelitian yang

²⁶ Dimas Pratama Putra “Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pariwisata Bukit 29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”, *Skripsi* (Malang: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Obyek penelitiannya adalah Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata, yang di laksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur. Teknik pemilihan subyek penelitian adalah teknik purposive dengan meminta keterangan informan sebanyak 16 orang yang dipilih dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap tahu tentang permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif dengan berpedoman pada pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Januar Dwi Baskoro dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas kebijakan, meneliti, memahami, dan mengkaji tentang kebijakan pariwisata. Sedangkan perbedaan dari skripsi Januar Dwi Baskoro dengan penulis skripsi Januar Dwi Baskoro lebih meneliti implementasi kebijakan, pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur, dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkaji, memahami, hukum Islam terhadap pariwisata.²⁷

Keempat, Miranda Wulandari Mantouw, Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta”**. Dalam skripsinya yang di tulis pada tahun 2018, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis menyatakan bahwa, Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memaparkan serta menjelaskan kegiatan atau obyek yang diteliti, yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau

²⁷ Januar Dwi Baskoro “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata”, *Skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Magister (S2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2018)

membedakannya dengan fenomena yang lain. Obyek dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kota Yogyakarta. Subyek dalam penelitian ini adalah Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Kasi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata, Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Masyarakat dan juga wisatawan asing maupun lokal yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah pemilihan siapa subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Miranda Wulandari Mantouw dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas kebijakan, meneliti, memahami, dan mengkaji tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pariwisata. Sedangkan perbedaan dari skripsi Miranda Wulandari Mantouw dengan penulis skripsi Miranda Wulandari Mantouw lebih meneliti implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, serta pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta, dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkaji, memahami, hukum Islam terhadap pariwisata.²⁸

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Elfira Soeda, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi, tahun 2011 yang berjudul **“Kebijakan Pemeritahan Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud”**. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah kepulauan terluar Indonesia yang memiliki pesona alam dan budaya yang mempesona. Semuanya itu merupakan sumber daya modal bagi usaha

²⁸Miranda Wulandari Mantouw “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Magister (S2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, 2018)

pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus di manfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Adanya rangkaian-rangkain upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam dalam penggunaan berbagai sumber-sumber daya yang berpotensi dan cara membuat para pengunjung menjadi tertarik terhadap suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Talaud menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Elfira Soeda dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas kebijakan, meneliti, memahami, dan mengkaji tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap pariwisata. Sedangkan perbedaan dari skripsi Elfira Soeda dengan penulis skripsi Elfira Soeda lebih meneliti pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkaji, memahami, hukum Islam terhadap pariwisata.²⁹

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Muhajidin, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2018 dengan judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”**. Dalam skripsinya yang di tulis pada tahun 2018, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Mujahidin dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun pada skripsi Mujahidin tidak membahas kebijakan pemerintah daerah, terhadap pariwisata. Sedangkan perbedaan dari skripsi Mujahidin dengan penulis skripsi Mujahidin lebih fokus meneliti atau

²⁹ Elfira Soeda Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2011 dengan judul *“Kebijakan Pemeritahan Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud”*.

menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bagaimana cara pencatatan dan pendataan pada badan pendapatan daerah kabupaten gowa, dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pandangan hukum Islam terhadap pariwisata.³⁰

Ketujuh, di dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh”**. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang ditulis oleh Rahmayani pada tahun 2021. Persamaan dan perbedaan antara skripsi Rahmayani dengan penulis ialah dari persamaan sama sama membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun pada skripsi Rahmayani tidak membahas kebijakan pemerintah daerah, terhadap pariwisata. Akan tetapi skripsi Rahmayani lebih fokus menganalisis seberapa besar pengaruh objek wisata dan wisatawan yang datang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Banda Aceh. Sedangkan perbedaan dari skripsi Rahmayani dengan penulis skripsi Rahmayani lebih fokus meneliti atau menganalisis seberapa besar pengaruh objek wisata dan wisatawan yang datang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tidak memberikan pandangan terkait pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih meneliti dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pandangan hukum Islam terhadap pariwisata.³¹

³⁰ Muhajidin “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pencatatannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

³¹ Rahmayani “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

I. Metodologi penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³² Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini berjenis penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus.³³ Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas culture-sharing, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu yaitu etnografi. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sistem pendekatan kualitatif khususnya studi kasus. Strategi penelitian ini dirasa sesuai untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada implementasi fungsi

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1980), 6.

³³ Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 68

³⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

pengawasan terhadap implementasi kebijakan Pemerintahan Daerah terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Majalengka, serta kendala-kendala yang dihadapi dilapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah sumber pendukung kebenaran suatu penelitian tersebut, dengan dibantu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif khususnya studi kasus, data primer diperoleh dari kesimpulan permasalahan terkait kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap sektor pariwisata, yakni berupa hasil studi kasus serta wawancara dari subjek penelitian.

b. Data skunder

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, majalah, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ialah dengan beberapa teknik, diantaranya:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Didalam observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisisioner, rekaman gambar, rekaman suara (Arikunto, 2006:157). Penggunaan teknik observasi sangatlah penting guna peneliti dapat melihat secara langsung suasana, keadaan, serta kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview ini ialah metode dengan sistem percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Metode wawancara ini di gunakan untuk memperoleh data secara akurat dan langsung dari narasumber. Wawancara yang dilakukan penulis di antaranya dengan pejabat terkait dan pengelola objek wisata.

c. Dokumentasi

Metode ini berupa metode untuk mencari atau menemukan sumber data baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan sumber data mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap sektor pariwisata.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yang tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait objek permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶ Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum kemudian ditarik menjadi khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

³⁵ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Produser penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta:158

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

J. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, antaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yakni merupakan gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori, yang meliputi kebijakan pemerintah daerah, pariwisata, pendapatan asli daerah (PAD), dan persfektif hukum islam.

BAB III berisi tentang kondisi objek lokasi penelitian yang meliputi letak geografis Kabupaten Majalengka, struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan sektor pariwisata yang ada di Majalengka.

BAB IV berisi mengenai analisa terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Pada bab ini terdiri dari Hasil Penelitian, dan Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Majalengka, 2) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Majalengka, 3) Persfektif Hukum Islam Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Terhadap Sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Majalengka.

BAB V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

K. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu 4 bulan terhitung dari bulan Maret sampai Juni bulan 2022.

TABLE 1. 1: Rencana Kegiatan Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun			
		2022	2022	2022	2022
		Mei	Juni	Juli	Agustus
1	PRA PENELITIAN - Penyusunan proposal Penelitian				
2	PELAKSANAAN PENELITIAN - Pengumpulan data - Pengelolaan data dan analisis data				
3	PASCA PENELITIAN - Penyusunan penelitian skripsi				
4	OUTCOME PENELITIAN - Skripsi dan jurnal penelitian - Munaqosah Dan Perbaikan Skripsi				